



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**KEWIRAUSAHAAN PUBLIK (*PUBLIC ENTREPRENEURSHIP*) DALAM
MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Ni Made Eti Widhiari

2013310006

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**KEWIRAUSAHAAN PUBLIK (*PUBLIC ENTREPRENEURSHIP*) DALAM
MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Skripsi

Oleh

Ni Made Eti Widhiari

2013310006

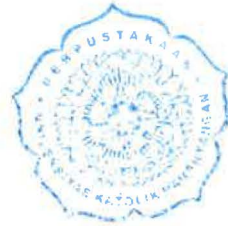
Pembimbing

Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ni Made Eti Widhiari
Nomor Pokok : 2013310006
Judul : **Kewirausahaan Publik (*Public Entrepreneurship*) Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 17 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

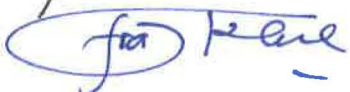
Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Maria Rosarie Harni T., S.IP., M.Si

: 

Sekretaris

Tutik Rachmawati, Ph.D

: 

Anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Made Eti Wdhiari
NPM : 2013310006
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : **KEWIRAUSAHAAN PUBLIK (*PUBLIC ENTREPRENEURSHIP*) DALAM MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya ataupun pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 7 Januari 2017



Ni Made Eti Widhiari

ABSTRAK

Nama : Ni Made Eti Widhiari
NPM : 2013310006
Judul : KEWIRAUSAHAAN PUBLIK (PUBLIC ENTREPRENEURSHIP) DALAM MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Penelitian ini bertujuan untuk membuat analisa tentang pengaruh kewirausahaan publik (*public entrepreneurship*) dalam mewujudkan kinerja organisasi publik. Konsep kewirausahaan pada organisasi publik sangat penting untuk dimasukkan dalam pola pikir aparatur – aparatur penyelenggara negara. Konsep ini juga dapat digunakan untuk merubah orientasi aparatur organisasi publik agar lebih antisipatif, kreatif, inovatif, dan mampu menangkap peluang. Penelitian ini menggunakan teori kewirausahaan publik untuk melihat bagaimana karakteristik kewirausahaan publik dapat ditemukan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana nilai – nilai kewirausahaan publik dapat mempengaruhi kinerja dari sebuah organisasi publik.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian studi kasus di SKPD Kabupaten Bandung Barat. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Analisa data dilakukan dengan metode analisis kuantitatif deskriptif untuk menyajikan angka – angka hasil perhitungan atau pengukuran yang diklasifikasi, diproses dan dianalisa. Fokus penelitian ini adalah 21 SKPD Kabupaten Bandung Barat dengan total responden sebanyak 275, 80 responden merupakan kepala bidang dan 195 informan masyarakat yang dipilih secara acak. Untuk memperdalam analisis, panduan wawancara terdiri dari pertanyaan yang berhubungan dengan karakteristik kewirausahaan publik (pengambilan resiko, memanfaatkan peluang, melakukan inovasi dan *mission driven*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik kewirausahaan yang paling menonjol adalah memanfaatkan peluang dan *mission driven*. Sedangkan karakteristik kewirausahaan publik yang lainnya (mengambil resiko dan melakukan inovasi) masih rendah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa karakteristik kewirausahaan publik dapat mempengaruhi peningkatan kinerja organisasi seperti nilai ekonomis, nilai efisien dan nilai efektivitas.

Kata Kunci: Kewirausahaan Publik, Kinerja Organisasi Publik.

ABSTRACT

Name : Ni Made Eti Widhiari

NPM : 2013310006

Title : ***“Advancing Public Organization Performance Through Public Entrepreneurship : A Case Study of Bandung Barat District”***

This study aims to analyze the influence of public entrepreneurship in realizing the performance of a public organization. The concept of entrepreneurship in public organizations is very important to be included in the mindset of the apparatus of state officials. It can also be used to change the orientation of public organizations apparatus to be more anticipatory, creative, innovative, and able to seize opportunities. This study uses the theory of public entrepreneurship to see how the public entrepreneurial characteristics can be found in the Regional Work Units (SKPD) by utilizing existing resources to meet the needs of the community. This study will also analyze how the value of public entrepreneurship can affect the performance of a public organization.

This study uses quantitative methods with a case study research design in SKPD of West Bandung regency. The data collection was conducted using questionnaires. Data analysis was done using descriptive quantitative analysis involving 21 Work Regional Units of West Bandung in total, the number of respondents are 275 which consists of 80 respondents are head of divisions of Regional Work Units and 195 respondents are community members which were selected using random sampling. To have a deeper analysis, an interview guide was constructed as the base to do interviews to understand about the characteristics of public entrepreneurship (taking a risk, take advantage of opportunities, innovation and mission driven).

The results of this study indicate that the most observable public entrepreneurship characteristic are the ability to identify the opportunities and mission driven. Whereas the other characteristic of public entrepreneurship (taking a risk and creating innovations) still low. This research also shows that the characteristic of public entrepreneurship has an effect in improving the organization performance such as economic value, efficiency value and effectiveness value.

Keywords: ***Public Entrepreneurship, Performance of Public Organization***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewirausahaan Publik (*Public Entrepreneurship*) Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat”. Skripsi ini merupakan penelitian ilmiah untuk memenuhi syarat akhir dalam mencapai gelar Sarjana jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Skripsi ini merupakan penelitian mengenai bagaimana peran kewirausahaan publik (*public entrepreneurship*) dilakukan dalam mewujudkan kinerja di SKPD Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab keingintahuan penulis mengenai pelaksanaan kewirausahaan publik dapat mempengaruhi kinerja organisasi publik. Manfaat dari skripsi ini tentu untuk memperkaya pengetahuan penulis di Sektor Administrasi Publik, manfaat lainnya yaitu sebagai karya ilmiah yang dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan penulis di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan kepada penulis, kepada kedua orang tua saya I Made Sujana dan Endang Supriyati, kakak saya I Putu Adi Wirathama, serta keluarga besar lainnya yang menjadi motivasi terbesar kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas pendidikan dengan sebaik – baiknya. Tak lupa penulis sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk dosen pembimbing peneliti Tutik Rachmawati, S.IP.,MA.,Ph.D. yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Tutik Rachmawati, S.IP.,MA.,Ph.D. dan Kristian Widya Wicaksono, S.Sos.M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si. selaku dosen wali pembimbing.
4. Segenap dosen pengajar, staf pelaksana, serta seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
5. Dudung Sumahdumin, Dr., SH., MPA., dan Budi Setiawan yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti.

6. Segenap narasumber di SKPD Kabupaten Bandung Barat, yang telah memberikan informasi terkait untuk menjawab pertanyaan penelitian.
7. Ibu Dina, Ibu Anggi, Bapak Hadi, Bapak Gunarsah, Ibu Heni, Ibu Etty, Bapak Sudrajat, Bapak Nana dan Bapak Jejen yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data di lapangan.
8. Rekan seperjuangan dan yang saling menguatkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Christy Natalia Sagala, Nicky Dharmawan Kosasih dan Puti Tiara.
9. Jeane Antonie, Amritashanti dan Livia Joselyn yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan tugas akhir walaupun terhalang jarak.
10. Afni Fadilla Surya, Natasya Abilla, Dewi Fitriany Fortuna, Stephanie Novi Karisa dan Femmi Sernitasari yang menjadi sahabat dan keluarga selama penulis menempuh pendidikan di Bandung yang begitu sabar dan selalu memberikan dukungan, hiburan dan menjadi tempat curahan hati penulis.
11. Rekan – rekan Advance angkatan 2013. Selly, Rana, Felix, Abhip, Dika, Abang, Fauzan, Hilmi, Arya yang telah memberikan semangat dan kenangan yang tidak terlupakan. Serta terimakasih banyak kepada seluruh anggota tim Advance Bhaladika dan Advance Bhayanaka.
12. Rekan – rekan satu rumah KKL, yaitu Early, Robby, Vano, Clara dan Kharisma , yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya.
13. Teman dan keluarga besar Administrasi Publik angkatan 2011, 2012, dan 2013 terimakasih atas dekungan dan bimbingannya.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini, dimana pun kalian berada terimakasih banyak untuk segalanya.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, 7 Januari 2017

Penulis,

Ni Made Eti Widhiari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR DIAGRAM.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Kegunaan Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Kewirausahaan Publik (Public Entrepreneurship)	18

2.2	Karakteristik Kewirausahaan Publik (Public Entrepreneurship).....	22
2.2.1	Kewirausahaan Publik Sebagai Kemampuan Pengambilan Resiko Atau Keberanian Mengambil Risiko	23
2.2.2	Kewirausahaan Publik Sebagai Kemampuan Memanfaatkan Peluang	26
2.2.3	Kewirausahaan Publik Sebagai Kemampuan Menciptakan Inovasi.....	27
2.2.4	Kewirausahaan Publik Sebagai Orientasi Tujuan Bersama (Mission Driven)	29
2.3	Konsep Kinerja Organisasi Publik	31
2.3.1	Pengukuran Kinerja dan Jenis – Jenis Pengukuran Kinerja Sektor Publik.	33
2.3.2	Value For Money (VFM).....	37
2.4	Kewirausahaan Publik Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Publik.....	43
2.5	Kerangka Penelitian	46
2.6	Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN		48
3.1	Desain Penelitian	48
3.2	Lokasi Penelitian	49
3.3	Variabel Penelitian	54
3.3.1	Variabel Independen	54
3.3.2	Variabel Dependen	55

3.4	Operasional Variabel	56
3.4.1	Karakteristik Kewirausahaan Publik (Public Entrepreneurship)	56
3.4.2	Kinerja Organisasi Publik	59
3.5	Populasi dan Sampel	61
3.5.1	Populasi	61
3.5.2	Sampel	61
3.6	Sumber Data	63
3.7	Teknik Pengumpulan Data	65
3.7.1	Kuesioner (Angket)	65
3.8	Skala Pengukuran	66
3.9	Pengujian Alat Ukur	69
3.9.1	Uji Validitas	69
3.9.2	Uji Reliabilitas	77
3.10	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	82
3.10.1	Teknik Pengolahan Data	82
3.10.2	Teknik Analisis Data	83
3.11	Uji Korelasi	91
BAB IV PROFIL KABUPATEN BANDUNG BARAT		94

4.1	Organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	94
4.2	Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat.....	104
4.2.1	Visi.....	104
4.2.2	Misi.....	105
4.3	Tujuan dan Sasaran	107
4.4	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	109
4.4.1	Strategi.....	109
4.4.2	Arah Kebijakan Daerah	110
4.5	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	110
BAB V TEMUAN.....		112
5.1	Kewirausahaan Publik.....	113
5.2	Pengukuran Kinerja Organisasi.....	127
BAB VI PEMBAHASAN PENELITIAN.....		225
6.1	Karakteristik Kewirausahaan Publik (Public Entrepreneurship) Di Lingkungan SKPD Kabupaten Bandung Barat	225
6.1.1	Karakteristik Kewirausahaan Publik: Kemampuan Dalam Pengambilan Risiko.....	226
6.1.2	Karakteristik Kewirausahaan Publik: Kemampuan Memanfaatkan Peluang	233

6.1.3 Karakteristik Kewirausahaan Publik: Kemampuan Menciptakan Inovasi	240
6.1.4 Karakteristik Kewirausahaan Publik: Mission Driven atau Memiliki Tujuan Utama.....	248
6.2 Kesesuaian Karakteristik Kewirausahaan Publik (Public Entrepreneurship) Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Publik di SKPD Kabupaten Bandung Barat	250
6.2.1 Pengukuran Kinerja SKPD di Kabupaten Bandung Barat.....	250
6.2.2 Karakteristik Kewirausahaan Publik (Public Entrepreneurship) Dalam Mewujudkan Kinerja SKPD di Kabupaten Bandung Barat.....	256
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	267
7.1 Simpulan.....	267
7.2 Saran	269
DAFTAR PUSTAKA	272

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kategori Jawaban (Pemahaman SKPD Terhadap Nilai – Nilai Kewirausahaan Publik (<i>Public Entrepreneurship</i>) (Skala Ya dan Tidak)	67
Tabel 3.2	Kategori Jawaban (Tingkat Pemahaman (Skala Ya dan Tidak).....	67
Tabel 3.3	Kategori Jawaban (Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat (IKM) Terhadap Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan).....	68
Tabel 3.4	Kategori Interpretasi IKM.....	69
Tabel 3.5	Uji Validitas Kuesioner Skala Guttman (Skala Ya dan Tidak).....	72
Tabel 3.6	Uji Validitas Kuesioner Skala Likert (Pertanyaan Terkait “Indeks Kepuasan Masyarakat”)	76
Tabel 3.7	Uji Reliabilitas Kuesioner Skala Guttman.....	79
Tabel 3.8	Uji Reliabilitas Kuesioner Skala Likert	82
Tabel 3.9	Penilaian Kinerja Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas	76
Tabel 3.10	Penentuan Hasil Kinerja Input dan Output	88
Tabel 3.11	Nilai Persepsi Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	90

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran	108
Tabel 6.1	Tugas Utama Pemerintahan	246
Tabel 6.2	Hubungan Kewirausahaan Publik Terhadap Kinerja	257
Tabel 6.3	Correlations.....	259

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rantai Value For Money.....	39
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	95

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 6.1	Kemauan SKPD Kabupaten Bandung Barat Dalam Melakukan Perubahan	227
Diagram 6.2	Bentuk Perubahan Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja	228
Diagram 6.3	Perubahan Atas Dasar Kesadaran Diri Sendiri.....	229
Diagram 6.4	Berani Menerima Konsekuesni Atas Aktivitas Yang Dilakukan	230
Diagram 6.5	Perubahan Yang Tidak Sesuai Dengan SOP	232
Diagram 6.6	Kemauan SKPD Kabupaten Bandung Barat Dalam Mengidentifikasi Peluang	234
Diagram 6.7	Cara – Cara Mengidentifikasi Peluang.....	235
Diagram 6.8	Memperhatikan Ketersediaan Sumberdaya Dalam Memanfaatkan Peluang	236
Diagram 6.9	Pemanfaatan Peluang Untuk Mencapai Keuntungan Tertentu	239
Diagram 6.10	SKPD Kabupaten Abndung Barat Yang Melakukan Inovasi	240

Diagram 6.11 Terdapat Aktivitas Atau Kegiatan Aru Yang Belum Pernah Dilakukan Sebelumnya.....	243
Diagram 6.12 Peningkatan ubungan Dengan Pihak Eksternal.....	245
Diagram 6.13 Berhati – hati Menjaga Kerahasiaan Dalam Emnciptakan Perubahan	247
Diagram 6.14 Mengutamakan Tujuan Organisasi	249
Diagram 6.15 Pengukuran Kinerja Dilihat Dari Aspek Ekonomi	252
Diagram 6.16 Pengukuran Kinerja Dilihat Dari Aspek Efisiensi	253
Diagram 6.17 Pengukuran Kinerja Dilihat Dari Aspek Efektivitas	255

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kueioner

Lampiran 2 : Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat

Lampiran 3 : Pengolahan Hasil Kuesioner

Lampiran 4 : LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2015

Lampiran 5 : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 6 : Kartu Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kewirausahaan penting untuk dikembangkan di semua sektor. Tujuan dikembangkannya kewirausahaan di sektor publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Di sektor publik, timbulnya New Public Management (NPM) telah sedemikian berkembang menjadi gerakan yang mengusung tujuan pokok untuk mengefisienkan pengelolaan pemerintahan serta menyuntikan entrepreneur dan keunggulan kompetitif terhadap sektor publik.¹ Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang mengimplementasikan pemikiran NPM ini berorientasi pada jiwa dan semangat kewirausahaan, sehingga NPM di tubuh pemerintahan dapat disebut sebagai kewirausahaan publik atau *public entrepreneurship*.

Konsep kewirausahaan pada organisasi publik sangat penting untuk dimasukkan dalam pola pikir aparatur – aparatur penyelenggara negara.² Artinya hal terpenting adalah merubah orientasi aparatur organisasi publik agar lebih antisipatif,

¹Arlennora M, *Kapasitas Manajemen Kewirausahaan Dan Kinerja Organisasi*(Pekanbaru: FISIP Universitas Riau, 2013), Hlm. 115.

²Idris Yanto Niode, *Implementasi Entrepreneurial Government Dan Kinerja Pemerintah Daerah*, (Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, 2012), Hlm. 1.

kreatif, inovatif, dan mampu menangkap peluang. Semangat kewirausahaan atau *public entrepreneurship* pada organisasi publik merupakan konsep yang sangat penting dalam rangka pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Kewirausahaan dikenal sebagai suatu proses penciptaan nilai dengan menggunakan berbagai sumber daya tertentu untuk mengeksploitasi peluang.³ Hal tersebut membuat konsep kewirausahaan ini mendapat perhatian yang sangat luas dan intensif dikalangan pakar akademis maupun dikalangan praktisi baik ekonomi, manajemen bisnis serta para pejabat yang bergerak disektor publik.

Seperti yang disampaikan oleh Shockley et al⁴ mengenai konsep kewirausahaan publik dalam memanfaatkan peluang yang potensial. Ia mendefinisikan *public entrepreneurship* atau kewirausahaan publik sebagai:

“Public sector entrepreneurship accours wherever a political actor is a lent to and acts on potential profit opportunities, thus moving the system in which the actor is embedded toward equilibrium.”

Singkatnya, Shockley dkk menjelaskan bahwa kewirausahaan publik atau *public entrepreneurship* terjadi saat aktor politik mengenali peluang yang potensial akan menghasilkan keuntungan dan meresponnya dengan bertindak tepat, dengan demikian akan menggerakkan sistem dimana aktor tersebut berada menuju keseimbangan. Sederhananya kewirausahaan publik selalu berkaitan dengan memanfaatkan peluang,

³*Ibid.*

⁴Shockley, G. E., Stough, R. R., Haynes, K. E., & Frank, P. M., *Toward A Theory Of Public Sector Entrepreneurship*, (International Journal off Entreneurship and Innovation Management, 2006), Hlm. 205.

dimana dengan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut dapat meningkatkan keuntungan yang maksimal.

Pengertian mengenai konsep kewirausahaan juga diperkuat oleh Kearney et al⁵, yang mendefinisikan kewirausahaan publik sebagai:

“Public sector entrepreneurship refers to state enterprise/civil service is defined as an individual or group of individuals, who undertakes desired activity to initiate change within the organization, adapt, innovate and facilitate risk. Personal goals and objectives are less important than the generation of a good result for the state enterprise/civil service.”

Berdasarkan definisi konsep kewirausahaan publik tersebut, dapat dilihat bahwa kewirausahaan merujuk pada perusahaan milik negara atau pegawai negeri yaitu seseorang atau satu kelompok yang melaksanakan aktifitas yang ditujukan untuk mengawali perubahan dalam organisasi publik, melakukan penyesuaian, berinovasi dan mengambil resiko. Dan tujuan – tujuan pribadi individu menjadi hal yang tidak relevan dibandingkan dengan tujuan organisasi.

Kedua definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, jelas bahwa konsep kewirausahaan di sektor publik sama-sama menekankan aspek inovasi dan kreativitas. Hanya saja pada definisi pertama menekankan pada pemanfaatan peluang, sedangkan definisi kedua menekankan pada melakukan inovasi dan berani mengambil resiko. Didalam sektor publik, memanfaatkan peluang, menciptakan inovasi yang kreatif, dan

⁵Kearney, C., Hisrich, R. D., & Roche, F., *Facilitating Public Sector Corporate Entrepreneurship Process: A Conceptual Model*, (Journal of Enterprising Culture, 2007), Hlm. 277.

berani mengambil resiko merupakan hal – hal yang sangat perlu dilakukan dalam mewujudkan kinerja pemerintah. Tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah baik pusat dan daerah serta perusahaan milik pemerintah, dan organisasi sektor publik lainnya untuk memperbaiki kinerjanya mendorong dibangunnya sistem manajemen organisasi sektor publik yang berbasis kinerja.⁶ Proses, yang dilakukan khususnya mengenai bagaimana proses pekerjaan tersebut dilakukan agar mencapai pada hasil yang diharapkan, dapat dituangkan dalam suatu konsep manajemen kinerja yang mengarah pada pencapaian tujuan suatu organisasinya.

Penjelasan diatas dapat ditarik pengertian bahwa kinerja adalah perbuatan, penampilan, prestasi, daya guna dan unjuk kerja dari suatu organisasi atau individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur. Pada dasarnya kinerja perseorangan harus lebih diperhatikan karena kinerja organisasi merupakan hasil kumpulan kinerja perseorangan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai mempunyai peranan yang penting dalam organisasi, oleh karena itu seorang pegawai negeri perlu berada pada kondisi yang unggul, artinya mampu mewujudkan perubahan dengan cara inovatif dan proaktif. Selain inovatif dan proaktif, seorang pegawai negeri juga dituntut untuk menjadi individu yang berani dalam mengambil resiko. Keberanian dalam mengambil resiko ini sangat diperlukan terutama mengingat sumber daya publik yang sangat terbatas dan butuh sesuatu yang baru untuk dapat memenuhi kebutuhan publik.

⁶Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta : STIM YKPN, 2015), Hlm 1

Namun sampai saat ini konsep kewirausahaan publik di dalam bidang ilmu administrasi publik di Indonesia masih sangat terbatas, padahal semangat kewirausahaan publik atau *public entrepreneurship* dipercaya sebagai salah satu penanda adanya peningkatan kinerja birokrasi dan organisasi publik.⁷

Belum dapat diterimanya tindakan – tindakan kewirausahaan publik tercermin dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat ini merupakan salah satu daerah yang dimekarkan, dan Kabupaten Bandung Barat ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Daerah kabupaten ini dimekarkan pada tahun 2007 dan berdasarkan pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat tentunya ingin mensejajarkan dalam hal pembangunan dengan kabupaten lain yang lebih dahulu terbentuk. Pembangunan yang dimaksud tentunya diberbagai bidang agar dapat mencapai kesejahteraan. Keinginan pemerintah Kabupaten Bandung Barat tersebut untuk bisa sejajar dengan kabupaten lain, membuat seluruh SKPD bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Namun, diusianya yang kedelapan Pemerintah Kabupaten Barat masih diwarnai oleh keterbatasan aparatur daerah, seperti infrastruktur, profesionalitas personalia dan organisasi, potensi sumber daya, dan inefisiensi penggunaan anggaran, sehingga berpengaruh pada kinerja birokrasi Pemerintahan KBB, disamping itu ketidak jelasan kebijakan politik pada

⁷Tutik Rachmawati, *Kewirausahaan Publik Dan Revolusi Mental: Menuju Administrasi Publik yang Lebih Baik*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2016), Hlm. 3.

kepentingan dan kebutuhan masyarakat memperburuk pelayanan publik. Hal ini bisa dilihat antara lain dari:⁸

1. Masih banyaknya keluhan masyarakat tentang mekanisme dan tarif pelayanan publik yang kurang transparan dan lamban;
2. Berbagai kegiatan dan kebijakan Pemerintah yang kurang bermanfaat bagi masyarakat, bahkan menimbulkan pemborosan anggaran, atau dengan kata lain penyelenggaraan pemerintahan belum berpegang pada kaidah – kaidah kompetensi, efisiensi, dan efektif;
3. Terjadinya *Disclaimer* dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan daerah;
4. Pembayaran atas pengadaan barang dan jasa kepada pihak ketiga (pengusaha barang dan jasa) yang selalu terlambat;
5. Berbagai tunjangan yang selalu terlambat dibayarkan pada aparat fungsional/struktur yang ada di bawah dan daerah;
6. Pembiayaan program – program dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang selalu terlambat dikucurkan ke desa – desa;
7. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) yang sangat besar di setiap tahun anggaran;

⁸ Wahana Jaringan Informasi Terpadu (WAJIT). ”*Permasalahan & Issue Strategis Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat*”. <https://m.facebook.com/notes/wahana-jaringan-informasi-terpadu-wajit/permasalahan-issue-strategis-pembangunan-di-kabupaten-bandung-barat/470851019593156/> diakses pada tanggal 23 Februari 2016 (20:05)

8. Implementasi pembangunan fisik maupun non-fisik belum sepenuhnya berdasarkan standar pelayanan minimum (SPM), dan belum memenuhi kaidah – kaidah akuntabilitas profesional/administrasi, akuntabilitas publik, akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas moral;
9. Belum ada program yang sungguh – sungguh mengarah pada akselerasi peningkatan pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, program – program yang ada sebagian besar merupakan produk Pemerintah Pusat, dan atau Provinsi.

Tidak hanya itu, seperti yang dilansir dalam Pikiran Rakyat (*Online*)⁹ bahwa kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan mendapatkan nilai C. Hal itu berdasarkan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian tersebut berdasarkan pada beberapa indikator, mulai dari kinerja pegawai, pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran sampai dengan evaluasi kegiatan. Dari sekian indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian, perencanaan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat cukup menjadi sorotan. Pasalnya, perencanaan program dinilai belum optimal dengan pencapaian hasilnya. Kekurangan tersebut, mulai dari merumuskan tujuan, sasaran,

⁹ Pikiran Rakyat, “*Nilai C Untuk Kinerja Pemkab Bandung Barat*”, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/02/17/361344/nilai-c-untuk-kinerja-pemkab-bandung-barat> diakses pada tanggal 9 Maret 2016 (15:45)

merumuskan kunci keberhasilan, menentukan indikator untuk mencapai tujuan keberhasilan dan evaluasi kegiatan.

Isu strategis dan penilaian yang muncul terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat diidentifikasi bahwa, raihan nilai tersebut menunjukkan masih kurangnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat akibat kinerja SKPD yang rendah. Sangat penting bagi seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik. Dengan usianya yang masih sangat muda, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih memiliki banyak peluang untuk memperbaiki segala kekurangan. Dalam memanfaatkan peluang yang ada tersebut tentu setiap aparat SKPD harus berani dalam mengambil risiko dari tindakan yang dilakukan.

Sembilan permasalahan yang telah disebutkan diatas menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebenarnya memiliki banyak peluang, namun belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh aparat pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kewirausahaan publik di kabupaten Bandung Barat rendah. Tidak hanya dalam memanfaatkan peluang, tetapi juga dalam menciptakan hal – hal baru yang lebih inovatif guna mendukung kinerja aparat pemerintah.

Indikasi rendahnya kewirausahaan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman aparat pemerintah kabupaten tentang kewirausahaan publik. Hasil wawancara dengan **Kepala Sub**

Bidang Kesehatan dan Sosial Kabupaten Bandung Barat membuktikan hal tersebut:

“Kalau inovasi mah pasti dilakukan oleh seluruh bidang, badan dan dinas. Tapi tidak semua bidang, badan dan dinas melakukan wirausaha, karena gak semua bidang mempunyai bentuk usaha kayak koperasi gitu.”¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa beliau hanya mengartikan konsep kewirausahaan sebagai suatu konsep yang hanya diterapkan dalam sektor private. Beliau berpendapat kewirausahaan di sektor publik tidak mungkin dilakukan karena tidak semua bidang, badan dan dinas memiliki koperasi sebagai bentuk wirausaha. Bahkan dapat disimpulkan bahwa pemahaman aparat pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menterjemahkan konsep kewirausahaan publik tidak tepat dan melakukan inovasi tidak tepat dilakukan di sektor publik. Hal inilah yang menyebabkan kurang mampunya aparat pemerintah dalam mewujudkan inovasi yang diciptakan.

Walaupun hasil wawancara tersebut menunjukan pemahaman aparat pemerintah yang rendah mengenai konsep kewirausahaan publik, namun sebenarnya konsep kewirausahaan publik sudah mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tetapi memang dalam penerapan konsep tersebut belum dijalankan dengan maksimal. Seperti yang disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

¹⁰Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Sosial Kabupaten Bandung Barat (4 April 2016: 13:45)

Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat mengatakan sebagai berikut:

“Memang dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaan, kita dituntut untuk melakukan inovasi dan kreatifitas. Namun tentunya perlu adanya adaptasi dalam menjalankan tiap – tiap perbaharuan tersebut. Khususnya di Kabupaten Bandung Barat ini. Karena kan Kabupaten ini terhitung masih muda, jadi segala sesuatu nya masi dalam proses adaptasi dan belajar.”¹¹

Dari pernyataan yang disampaikan tersebut dapat dipahami bahwa aparat pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih perlu untuk beradaptasi dengan inovasi – inovasi yang diciptakan. Tidak hanya itu, beliau juga mengatakan bahwa:

“Sudah ada beberapa inovasi yang dilakukan, seperti pelayanan satu atap yang menjadi tanggung jawab bagi bidang yang bersangkutan. Tetapi itu tadi, karena Kabupaten kami masih muda sehingga tidak jarang inovasi yang dibuat belum maksimal.”

Dengan demikian terlihat pula bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan inovasi, namun belum maksimal dalam mewujudkan inovasi tersebut. Belum maksimalnya inovasi tersebut dilakukan menandakan kurang mampunya aparat pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada, sehingga tujuan dari dibuatnya inovasi belum dirasakan secara utuh oleh masyarakat.

Keterbatasan aparat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan inovasi dalam pelayanan publik juga dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 warga Kabupaten Bandung Barat

¹¹Hasil wawancara dengan Sekretaris BAPPEDA (4 April 2016: 13.25)

yang sedang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,¹² hampir 9 warga mengatakan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kurang memuaskan. Yang artinya, berdasarkan wawancara presentasi masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan mencapai 60% dikarenakan pelayanan buruk yang diberikan aparat pemerintah kabupaten dalam menjalankan inovasi guna meningkatkan kualitas kerja dari aparat yang bertanggungjawab. Pelayanan yang buruk tersebut ditunjukkan dengan kinerja dari pegawai dinas yang masih lamban dalam memberikan pelayanan, kurang adanya inisiatif dari pegawai dinas dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan, serta sarana dan prasarana yang masih terbatas. Selain itu, 3 orang dari 15 orang tersebut, dalam arti 20% mengetahui adanya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, namun sekedar tahu adanya inovasi satu atap (bukan merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Sehingga produk pelayanan yang diberikan juga tidak bisa mencapai tujuan dari diberlakukannya program pelayanan. Ketidakpuasan masyarakat dengan pelayanan yang didapat tersebut diakibatkan oleh kinerja dari aparat yang bertugas itu sendiri. Dimana kinerja para pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sering kali masih lamban serta kurang responsif dan kualitas pelayanan yang masih belum juga membaik.¹³

¹²Hasil wawancara dengan 15 Warga Kabupaten Bandung Barat (19 April 2016: 14.15)

¹³Analisis hasil wawancara dengan 15 warga Kabupaten Bandung Barat, (19 April 2016: 14.15)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, menandakan bahwa tingkat kewirausahaan publik di Kabupaten Bandung Barat ini masih rendah. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari beberapa faktor: Faktor pertama adalah banyaknya peluang yang dapat digunakan untuk mewujudkan kinerja justru tidak dimanfaatkan dengan baik. Dapat dilihat pada beberapa pelayanan publik yang dirasakan gagal oleh masyarakat. Dimana pelayanan yang diberikan merupakan peluang yang seharusnya mampu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan kinerja yang prima. Kedua, kurang beraninya aparat pemerintah dalam mengambil resiko disetiap pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Dalam mencapai tujuan dari setiap perencanaan masih belum optimal, karena kurangnya keberanian untuk mewujudkan rencana – rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman aparat pemerintah kabupaten tentang konsep kewirausahaan publik. Aparat pemerintah kabupaten kebanyakan hanya mengartikan konsep kewirausahaan sebagai konsep yang diterapkan dalam dunia bisnis. Sehingga mereka enggan untuk menggunakan konsep itu, bahkan terkesan menolak untuk menerapkannya.

Berdasarkan faktor – faktor yang berasal dari kondisi pemerintah yang telah disebutkan diatas, maka keadaan yang terjadi dilapangan menguatkan bahwa indikasi tingkat kewirausahaan publik yang rendah. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari aparatur pemerintah di Kabupaten Bandung Barat, yang ditunjukkan

melalui penilaian oleh Wahana Jaringan Informasi Terpadu (WAJIT).¹⁴ Dalam penilaian tersebut, menunjukkan masih banyaknya keluhan masyarakat tentang mekanisme dan tarif pelayanan publik yang kurang transparan dan lamban, berbagai kegiatan dan kebijakan Pemerintah yang kurang bermanfaat bagi masyarakat, dan berdasarkan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan mendapatkan nilai C. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah penelitian untuk mencari tahu pengaruh kewirausahaan publik dalam mewujudkan kinerja organisasi publik. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **”Kewirausahaan Publik (*Public Entrepreneurship*) Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.”**

¹⁴Op. Cit., Wahana Jaringan Informasi Terpadu (WAJIT). *”Permasalahan & Issue Strategis Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat”*. <https://m.facebook.com/notes/wahana-jaringan-informasi-terpadu-wajit/permasalahan-issue-strategis-pembangunan-di-kabupaten-bandung-barat/470851019593156/> diakses pada tanggal 23 Februari 2016 (20:05)

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat kewirausahaan publik (*public entrepreneurship*) berdampak pada terwujudnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kewirausahaan publik di pahami oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat? Seberapa jauh konsep tersebut dilaksanakan secara nyata dalam pekerjaan mereka sehari-hari?
2. Bagaimana hubungan kewirausahaan publik tersebut dalam mewujudkan kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian Tingkat Kewirausahaan Publik (*Public Entrepreneurship*) Untuk Mewujudkan Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kewirausahaan publik (*public entrepreneurship*) di SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

2. Untuk mengetahui hubungan kewirausahaan publik dalam mewujudkan kinerja SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara akademis dan praktis yang berkaitan dengan tingkat kewirausahaan publik (*public entrepreneurship*) untuk mewujudkan kinerja seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Kegunaan Akademis: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kewirausahaan publik (*public entrepreneurship*) dalam mewujudkan kinerja di tingkat SKPD.

Kegunaan Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi SKPD, dalam meningkatkan kinerja dengan pemanfaatan kewirausahaan publik.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, pokok bahasan yang dibahas adalah:

- BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan mengenai Kewirausahaan Publik (*Publik Entrepreneurship*), Karakteristik Kewirausahaan Publik, Konsep Kinerja Organisasi Publik, Kewirausahaan Publik Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Publik, dan Kerangka Penelitian.
- BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai Tipe Penelitian, Peran Peneliti, Lokasi Penelitian, Operasional Variabel, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Skala Pengukuran, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Analisis Data.
- BAB IV PROFIL KABUPATEN BANDUNG BARAT, menjelaskan mengenai Kabupaten Bandung Barat serta Tujuan dan Sararan Kebijakan Daerah.
- BAB V TEMUAN, menjelaskan mengenai Temuan dari pengumpulan data terhadap Kewirausahaan Publik dan Temuan terhadap Pengukuran Kinerja SKPD Kabupaten Bandung Barat.
- BAB VI PEMBAHASAN PENELITIAN, menjelaskan mengenai Karakteristik Kewirausahaan Publik, Kesesuaian Karakteristik Kewirausahaan Publik

(Public Entrepreneurship) Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Publik di SKPD Kabupaten Bandung Barat.

- BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN, menjelaskan mengenai simpulan dan saran.